

BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah di laksanakan mengenai Pengalaman perempuan dalam mempertahankan tanah adat di desa Pandumaan dan sipituhuta di humbang hasundutan maka dapat di simpulkan :

Hubungan antara perempuan dan lingkungan sangat erat, dan hal ini menjadi salah satu fokus utama dalam kajian ekofeminisme. Pandangan ekofeminisme menempatkan perempuan dan lingkungan sebagai landasan analisis serta aksi nyata. Dalam konteks ini, peran perempuan dalam pengambilan keputusan serta penyusunan kebijakan lingkungan semakin krusial. Keterlibatan perempuan dalam pelestarian lingkungan diyakini mampu memperkuat ketahanan sosial dan ekologi. Inisiatif serta gerakan perempuan dalam upaya mitigasi dan pemulihan dari krisis sosial-ekologis menjadi sumber daya yang bernilai dan perlu terus didukung serta dikembangkan.

Perempuan Batak Toba memainkan peranan signifikan dalam menjaga kehidupan keluarga dan rumah tangga, termasuk dalam hal kelestarian lingkungan sekitar. Tanggung jawab pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga serta pendidikan anak sebagian besar berada di tangan perempuan, mencerminkan adanya beban budaya yang harus mereka emban. Dalam situasi yang serba tidak pasti, tidak mengherankan jika perempuan Batak Toba

bekerja keras demi menunjukkan eksistensi dan memperoleh pengakuan atas kontribusi besar mereka dalam kehidupan keluarga.

Demikian pula dalam perjuangan melawan perusahaan Toba Pulp Lestari (TPL), perempuan Batak Toba berada di garis depan, tidak hanya untuk mempertahankan hutan kemenyan yang menjadi sumber penghidupan, tetapi juga untuk menjaga kelestariannya. Perjuangan mereka dalam mempertahankan hutan adat kemenyan berlangsung lama dan dilakukan tanpa mengenal lelah, hingga akhirnya membuahkan hasil: hutan adat mereka menjadi satu-satunya di Sumatera yang telah diakui secara resmi oleh pemerintah.

Perjalanan panjang ini tak lepas dari dukungan sejumlah organisasi masyarakat sipil (NGO) yang secara aktif melakukan pendampingan. NGO tersebut tidak hanya mengadvokasi melalui berbagai aksi protes dan pendekatan ke lembaga pemerintah, tetapi juga melakukan pemberdayaan langsung terhadap perempuan Batak Toba agar bisa terlibat aktif dalam perjuangan mempertahankan wilayah adat mereka. Meskipun laki-laki juga ikut berperan dalam konflik dengan TPL, perjuangan perempuan terbukti lebih strategis dan menghasilkan pengakuan hukum dari pemerintah daerah atas wilayah hutan adat kemenyan bagi masyarakat Batak Toba di Pandumaan-Sipituhuta.

Selama ini, perempuan Batak Toba sering kali diposisikan secara subordinatif, hanya dianggap berperan sebagai petani ladang atau pelunasi

utang. Namun kenyataannya, perempuan dari Sipituhuta-Pandumaan telah membuktikan bahwa mereka adalah ujung tombak perjuangan yang berhasil mendorong pengakuan hutan adat kemenyan. Perjuangan ini belum usai, karena mereka masih terus berupaya mendapatkan sertifikat resmi dari Badan Pertanahan Nasional agar wilayah hutan adat mereka diakui secara penuh oleh negara.